



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Benteng Raih WTP ke-8

BENTENG, BE - Prestasi gemilang kembali didapat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020, Pemda Benteng kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penyerahan piagam penghargaan WTP langsung disampaikan oleh Kepala Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Syarwan SH MM kepada Bupati Benteng, Dr H Ferry Ramli SH MH di ruang rapat bupati (RRB), Jumat (29/10) siang. Pengharg. Melalui kesempatan itu, Syarwan mengatakan, WTP merupakan penilaian tertinggi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Artinya, apa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemda Benteng dianggap baik, sesuai dengan standar akuntansi dan patuh dengan semua aturan-aturan yang ada.

"WTP ini sangat membantu pemerintah dalam mencari investasi. Pengelolaan keuangan yang baik akan membuat investor percaya untuk berinvestasi di Kabupaten Benteng," kata Syarwan.

Bupati Benteng, Ferry Ramli mengatakan, di usia yang ke-13 tahun, Pemda Benteng telah berhasil meraih

8 kali WTP. Kedepan, sambung Bupati, dirinya berharap agar predikat WTP bisa kembali didapat. Sebab itulah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diingatkan untuk bekerja dan menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan baik.

"Mempertahankan WTP tak mudah dan terlepas dari kerja keras seluruh staf serta pejabat di semua OPD lingkungan Pemda Benteng," jelas Bupati. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Benteng, Welldo Kurniyanto SE MM menuturkan, Pemda Benteng mendapatkan reward berupa dana insentif daerah (DID) atas penghargaan WTP yang diraih.

"Alhamdulillah Kabupaten Benteng mendapat DID sebesar Rp 9,3 miliar walaupun mengalami penurunan dari yang sebelumnya lebih dari Rp 24 miliar. DID sudah ada peruntukan khusus, minimal 30 persen untuk penanggulangan Covid-19 di kesehatan, infrastruktur dan kegiatan lainnya," terang Welldo. (135)